



Yogyakarta Usulkan Kampung Iklim per Kelurahan

RW 8 Pandeyan pernah ditetapkan sebagai kampung iklim.

YOGYAKARTA – Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengusulkan pembentukan satu kampung iklim di tiap kelurahan tahun ini sebagai pelaksanaan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Setidaknya, kami akan mengusulkan satu kampung per kelurahan untuk menjalankan program kampung iklim (proklim). Bisa ditentukan oleh masyarakat atau langsung kami tunjuk," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Senin (23/4).

Menurut dia, Kota Yogyakarta sudah memiliki satu kampung yang pernah ditetapkan sebagai kampung iklim yaitu di RW 8 Pandeyan. Sedangkan usulan tahun ini, lanjut Suyana akan lebih ditekankan untuk menjalankan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara berkelanjutan. "Pengusulannya pun tidak lagi dilakukan manual tetapi sudah melalui aplikasi secara online," katanya.

Suyana menegaskan, beberapa aspek yang menjadi tolok ukur penetapan kampung sebagai kampung iklim di antaranya kemampuan wilayah untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap kemungkinan perubahan iklim.

"Misalnya saja di kampung tersebut sudah memiliki ruang terbuka hijau yang cukup. Kami akan lebih tekankan pada faktor lingkungan hidup, bukan sekadar budaya di masyarakat saja," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menjalankan program pembentukan Kampung Hijau selama beberapa waktu, bahkan sudah terbentuk di sejumlah kampung. "Tidak ada perbedaan yang mencolok antara Kampung Hijau dan Kampung Iklim. Kampung Hijau adalah program modifikasi dari Pemerintah DIY atas Program Kampung Iklim dari kementerian," kata Suyana.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, orientasi pembangunan kota pada saat ini lebih menekankan pada konsep *city for all* yaitu kota yang mampu diakses oleh semua warganya.

Beberapa aspek untuk mewujudkan *city for all*, lanjut Heroe, di antaranya adalah mewujudkan kota yang cerdas, serta kota yang hijau.

"Dari konsep tersebut, maka rencana pembangunan yang disusun pemerintah harusnya mampu mewujudkan sebuah kota yang nyaman huni bagi semua warganya. Salah satunya adalah kota yang memiliki kualitas lingkungan yang baik," katanya.

Sedangkan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sri Tantri Arundhati mengatakan, pelaksanaan program kampung iklim mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19/2012.

"Proklim sudah dikembangkan pada 2012. Hingga saat ini, jumlah kampung sudah semakin banyak dan ditargetkan pada 2030 akan ada 10.000 kampung iklim di seluruh Indonesia," katanya.

Sri Tanti menyebut, program tersebut ditujukan untuk mendorong partisipasi masyarakat melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Orientasi pembangunan kota pada saat ini lebih menekankan pada konsep *city for all*.

Berdasarkan data kementerian, dari 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, rata-rata memiliki kerentanan sedang terhadap perubahan iklim. "Meskipun masih tergolong sedang, tetapi jika tidak dilakukan upaya mitigasi maka kerentanan bisa meningkat," katanya.

Berbagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat di antaranya pengendalian kekeringan, banjir, longsor, peningkatan ketahanan pangan, pengendalian penyakit terkait iklim, pengelolaan sampah, dan limbah, penggunaan energi terbarukan, budi daya pertanian, hingga peningkatan vegetasi. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat
Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	<input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Positif <input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Amat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input checked="" type="checkbox"/> Biasa
- utt diketahui		Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005